

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan pengamanan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Dan kegiatan pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara, dengan fokus pembahasan yang lebih spesifik pada Barang Milik Negara berupa barang persediaan obat. Objek penelitian ini merupakan satuan kerja pemerintah pusat yang berada di wilayah kerja KPPN Kudus. Menggunakan data pada tahun anggaran 2020, data penelitian diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara barang persediaan obat yang sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012.

Kata kunci: Pengamanan, Pemeliharaan, Barang Milik Negara (BMN), Barang Persediaan Obat.

Abstract

Based on Government Regulation Number 27 of 2014, the Property Manager, Property User, and/or Proxy of Property User are obliged to carry out security and be responsible for the maintenance of State/Regional Property that is under their control. Security and maintenance activities are guided by the Decree of the Minister of Finance Number 21/KMK.01/2012 concerning Guidelines for the Security and Maintenance of State Property in the Ministry of Finance. Security activities include administrative security, physical security, and legal security. And maintenance activities are guided by the List of Maintenance Requirements for Goods. So this study aims to determine the implementation and the obstacles faced in securing and maintaining State Property, with a more specific focus on the discussion on State Property in the form of drug supplies. The object of this research is the central government work unit located in the work area of KPPN Kudus. Using data for the 2020 fiscal year, research data were obtained through interviews, observation, and documentation. The data obtained were processed using a qualitative narrative method. The results of the study indicate that the security and maintenance of State-Owned Goods for drug supplies have been carried out following the scope of the applicable regulations, namely the Decree of the Minister of Finance Number 21/KMK.01/2012.

Keywords: Security, Maintenance, State Property (BMN), drug supplies.